

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan adalah suatu bentuk bisnis yang diciptakan oleh pemilik untuk melayani kebutuhan pelanggan. Pemenuhan kebutuhan dapat berupa barang atau jasa yang dapat dijual kepada pelanggan, dan dengan tujuan memperoleh laba atas penjualan kepada pelanggan (Madura, 2009: 6). Tujuan perusahaan dalam jangka panjang adalah meningkatkan nilai perusahaan. Semakin tinggi nilai perusahaan menggambarkan bahwa semakin makmur perusahaan tersebut. Nilai perusahaan tersebut dapat tercermin melalui harga pasar sahamnya (Fama, 1978; dalam Wahyudi dan Pawestri, 2006).

Perusahaan dapat meningkatkan nilainya jika perusahaan berada pada kondisi yang sehat, dan dalam pengelolaannya harus menerapkan tata kelola yang baik. Kegiatan pengelolaan pasti menemukan kendala. Kendala dapat menyebabkan perusahaan gagal dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (Nuresa dan Hadiprajitno, 2013). Kendala yang menyebabkan kegagalan berawal dari konsep *agency theory*, yang berasumsi bahwa manajemen perusahaan sebagai *agents* bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran untuk memenuhi kepentingannya

sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham (Kaihatu, 2006). Kegagalan perusahaan dapat diindikasikan dengan adanya *financial distress* (Nuresa dan Hadiprajitno, 2013). *Financial distress* adalah suatu kondisi sebuah perusahaan tidak lagi mampu memenuhi kewajiban – kewajibannya baik secara jangka panjang ataupun secara jangka pendek. Ada dua kriteria bagi perusahaan yang mengalami *financial distress* yang pertama adalah *stock base insolvency* yaitu kondisi dimana sebuah perusahaan mengalami ekuitas negatif, yang kedua adalah *flow base insolvency* yaitu kondisi dimana *cash flow from operating* perusahaan tidak mampu membayar kewajiban jangka pendeknya. Jika perusahaan sudah mengalami ekuitas negatif maka perusahaan mengalami kebangkrutan dari segi ekuitas (Setyaningsih, Astawinetu, dan Nurraja 2008).

Pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis ekonomi dan mengakibatkan perusahaan perusahaan mengalami *financial distress*. *Financial distress* pada perusahaan perusahaan tersebut diakibatkan oleh tidak adanya *good corporate governance* (Kaihatu, 2006). Sementara krisis finansial global tahun 2008 – 2009 adalah salah satu fenomena lainnya yang terjadi pada perusahaan - perusahaan Indonesia, dan sektor manufaktur merupakan sektor ekonomi yang paling terkena dampak buruk dibanding sektor lainnya. Bahan baku primer sektor manufaktur mengalami kenaikan harga sehingga menyebabkan biaya produksi meningkat, pasar yang merupakan pasar utama sektor ini yaitu sektor ekspor ekonominya sedang

mengalami *financial distress* (Kamaludin dan Pribadi, 2011). Kinerja dari perusahaan manufaktur mengalami penurunan yang drastis, hal ini dapat terlihat dari omzet industri manufaktur sepanjang kuartal III/2009 hanya mencapai Rp 894,549 triliun atau merosot 21% dibandingkan dengan realisasi pada periode sama 2008 yang mencapai Rp 1.132,34 triliun (Saleh dan Sudiyatno, 2013). Hal tersebut dapat mempengaruhi eksistensi perusahaan yang apabila tidak dapat menerapkan *good corporate governance* dengan komite audit yang efektif, akan mengakibatkan perusahaan mengalami *financial distress* (Kamaludin dan Pribadi, 2011). Fenomena lainnya yang terjadi di luar negeri adalah kasus manipulasi laporan keuangan yang berujung pada *financial distress* oleh Enron akibat tidak adanya *good corporate governance* (Oktadella, 2011; dalam Wulandari dan Budiarta, 2014). Oleh karena itu *good corporate governance* dinilai sangat penting untuk diterapkan.

Good corporate governance (GCG) adalah sebuah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi semua *stakeholder* (Kaihatu, 2006). Ada dua hal utama yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder* (Monks, 2003; dalam Kaihatu, 2006). Agar *good corporate governance* dapat berjalan

dengan optimal dan efektif diperlukan dibentuknya suatu komite yang independen, yaitu komite audit, dan hal tersebut juga telah direkomendasikan oleh BAPEPAM melalui surat edaran No.SE-03/PM/2000 (Pembayun dan Januarti, 2012).

Pembentukan komite audit merupakan hal yang penting dalam menciptakan *good corporate governance*. Komite ini sangat penting karena berperan penting dalam memantau operasional perusahaan, dan sistem pengendalian internal dengan tujuan melindungi pemegang saham. Komite ini juga memberikan kontribusi untuk pengembangan manajemen strategis dari perusahaan, dan diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk dewan komisaris dalam menghadapi setiap masalah keuangan dan operasional. Komite audit yang efektif diharapkan untuk fokus pada optimalisasi kekayaan pemegang saham dan mencegah maksimalisasi kepentingan pribadi oleh manajemen puncak yang dapat merugikan pemegang saham (Nuresa dan Hadiprajitno, 2013). Definisi komite audit adalah suatu komite yang dibentuk untuk membantu tugas dewan komisaris dalam mengawasi, mengevaluasi kinerja perusahaan, kegiatan pelaporan keuangan, dan pelaksanaan audit internal serta merekomendasikan auditor eksternal di dalam perusahaan, dan komite tersebut harus beranggotakan pihak eksternal perusahaan yang independen (Utama, 2004).

Komite audit diharapkan bekerja secara efektif agar membuat perusahaan terhindar dari kondisi *financial distress*. Efektivitas tersebut diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX. 1.5 tentang

Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (Elyanto dan Syafruddin, 2013). Peraturan ini mencakup beberapa hal. Hal pertama adalah pengetahuan keuangan anggota komite audit karena dengan pengetahuan ini diharapkan agar komite audit dapat mencegah perusahaan mengalami *financial distress*. Kedua adalah ukuran anggota komite audit, idealnya harus terdiri dari minimal tiga orang. Ketiga adalah frekuensi rapat yang diadakan selama satu tahun, idealnya komite audit harus mengadakan rapat selama tiga sampai empat kali selama setahun untuk membahas sistem pelaporan keuangan. Keempat hal tersebut adalah independensi anggota komite audit, anggota komite audit harus terlepas dari jabatan manajemen dan tidak mempunyai hubungan usaha atau kekerabatan dengan dewan komisaris ataupun manajemen, sehingga diharapkan dapat memberikan penilaian yang obyektif (Bapepam-LK, 2012).

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nuresa dan Hadiprajitno (2013), yang meneliti pengaruh antara efektivitas komite audit dengan *financial distress*. Penelitian ini menggunakan variabel ukuran komite audit yang diukur berdasarkan jumlah anggota, independensi anggota komite audit dengan ukuran minimal harus ada satu anggota komisaris independen dalam komite audit, frekuensi pertemuan dengan ukuran minimal selama satu tahun harus mengadakan pertemuan formal sebanyak tiga sampai empat kali, dan pengetahuan keuangan anggota komite audit dengan ukuran minimal terdapat satu orang anggota komite yang mempunyai latar belakang akuntansi. Sampel menggunakan perusahaan manufaktur

yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2008-2009. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa ukuran komite audit, dan independensi anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Sementara variable frekuensi pertemuan dan pengetahuan keuangan berpengaruh terhadap *financial distress* (Nuresa dan Hadiprajitno, 2013).

Penelitian oleh Pembayun dan Januarti (2012), menggunakan variabel independen ukuran komite audit, pengetahuan keuangan komite audit, frekuensi pertemuan, dan independensi anggota komite audit. Menyatakan bahwa ukuran komite audit, dan pengetahuan keuangan komite audit berpengaruh terhadap *financial distress*. Sementara frekuensi pertemuan dan independensi anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Penelitian ini menggunakan populasi seluruh perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2007 – 2010 (Pembayun dan Januarti, 2012).

Penelitian Anggarini (2010), menggunakan variabel independen ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit, komite audit independen dan kompetensi komite audit. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dari kompetensi komite audit terhadap *financial distress*, sedangkan ukuran komite audit, komite audit independen, dan frekuensi pertemuan komite audit, tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress* (Anggarini, 2010; dalam Pembayun dan Januarti, 2012).

Penelitian Wulandari (2010), menggunakan variabel independen ukuran komite audit, komposisi anggota independen komite audit, frekuensi rapat komite audit, dan kompetensi komite audit terhadap *financial distress*. Hasil analisis menunjukkan hubungan pengaruh yang signifikan antara frekuensi pertemuan komite audit terhadap kesulitan keuangan, sedangkan ukuran komite audit, komposisi anggota independen komite audit, dan kompetensi komite audit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesulitan keuangan (Wulandari, 2010 ; dalam Pembayun dan Januarti, 2012).

Alasan penelitian terkini dilakukan adalah karena adanya hasil yang tidak konsisten antara penelitian dilakukan Nuresa dan Hadiprajitno (2013), Pembayun dan Januarti (2012), Anggarini (2010), dan Wulandari (2010). Penelitian ini akan menggunakan perusahaan yang termasuk dalam sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan sektor manufaktur karena sektor tersebut adalah sektor yang sebagian besar bahan bakunya adalah impor sehingga sektor ini sangat dipengaruhi oleh risiko gejolak mata uang asing. Contohnya adalah Melemahnya nilai tukar Rupiah sebesar 6,6% di tahun 2012 dari Rp9.068 per 1US\$ tahun 2011 menjadi Rp9.670 di tahun 2012 telah memberikan dampak bagi beban bahan baku dalam Rupiah meningkat (Laporan Tahunan PT. Kalbe Farma tbk, 2012) Hal tersebut dapat mempengaruhi eksistensi perusahaan yang apabila tidak dapat menerapkan *good corporate governance* dengan komite audit yang efektif, akan mengakibatkan perusahaan mengalami *financial*

distress (Kamaludin dan Pribadi, 2011). Data tahun penelitian adalah tahun 2011 – 2013, karena tahun ini adalah tahun terbaru untuk melakukan penelitian. Variabel independen penelitian ini adalah efektivitas komite audit, yang mencakup ukuran komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, independensi anggota komite audit, dan pengetahuan keuangan yang dimiliki oleh komite audit. Variabel dependen penelitian ini adalah *financial distress*.

1.2 Perumusan Masalah

Apakah efektivitas komite audit, yang mencakup ukuran komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, independensi anggota komite audit, dan pengetahuan keuangan yang dimiliki oleh komite audit berpengaruh terhadap *financial distress*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mendapatkan bukti empiris pengaruh efektivitas komite audit, yang mencakup ukuran komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, independensi anggota komite audit, dan pengetahuan keuangan yang dimiliki oleh komite audit terhadap *financial distress*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis: Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca, dan sebagai salah satu bahan acuan untuk melakukan penelitian lainnya.

2. Manfaat praktisi: Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu pertimbangan bagi para investor dalam menginvestasikan modalnya pada perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB 1 : PENDAHULUAN

Berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi penjelasan mengenai penelitian terdahulu, landasan teori yang mendasari penelitian, pengembangan hipotesis, dan model analisis.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Berisi desain penelitian; identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukurannya; jenis dan sumber data; metode pengumpulan data; populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel; serta teknik analisis data.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

berisi penjelasan mengenai karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB 5 : SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Berisi simpulan dari hasil analisis dan pembahasan, keterbatasan penelitian serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.